

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan suatu produk kebijakan pemerintah, sebagai bentuk pengalihan otoritas pengelolaan sektor fiskal daerah, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri melalui pengelolaan sumber- sumber penerimaan yang dimilikinya serta memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan daerahnya. Untuk memenuhi kebutuhan daerahnya pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep baru di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah. Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut memunculkan fenomena dimana terjadi banyak kasus dalam penerapannya, yaitu pencapaian dari kedua tujuan itu tidak bisa selalu berjalan beriringan. Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ternyata tidak dapat dilakukan di semua wilayah. Kebijakan ini memunculkan kesiapan yang berbeda dari setiap daerah. Sebagian besar daerah di berbagai wilayah di Indonesia ternyata tidak siap untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, walaupun ada beberapa daerah yang berhasil dalam pencapaian tujuan dari desentralisasi fiskal tersebut (R.Siagian 2010).

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan yang disertai dengan sumber daya pada pemerintah daerah sehingga daerah memiliki kewenangan dan kekuatan yang lebih besar melaksanakan kebijakan untuk menggali

pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerahnya. Berdasarkan teori federalisme fiskal, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur segala urusan di daerah, salah satu bentuknya adalah desentralisasi fiskal. Hingga saat ini, isu desentralisasi fiskal selalu menjadi pembicaraan. Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya desentralisasi fiskal kepada suatu daerah, dan pengukurannya dapat dilihat dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Teori Federalisme Fiskal memiliki dua perspektif teori yang menjelaskan tentang dampak ekonomi dari implementasi desentralisasi, yakni menurut *traditional theories (first generation theory)* dan *new perspective theories (second generation theories)*.

Melalui Pemberian otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan (Makmum,2004).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik tidak hanya terbatas pada sistem penerimaan pemerintah daerah saja, tetapi juga menyangkut efisiensi dalam pengalokasian pendapatan pemerintah daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Dari pengeluaran/belanja daerah inilah pemerintah daerah diharapkan dapat menekan jumlah tingkat pengangguran di daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah ialah salah satu instrument penting guna mengontrol perekonomian. Pada sekian banyak komponen yang ada pada laporan APBD di sebutkan jika kinerja keuangan bisa terpengaruh dengan adanya belanja daerah.

Sebagai negara berkembang, Negara Indonesia tak lepas dari masalah pengangguran. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja adalah salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan kemakmuran seseorang adalah tingkat pendapatannya. Dengan seseorang menganggur maka akan mengurangi tingkat pendapatan yang akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Pengangguran menjadi isu yang sangat serius di berbagai negara, terutama negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia. Angka pengangguran di sebuah negara sering kali digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi dan industri di negara tersebut (Saputri n.d.).

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang

“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana alokasi umum (DAU) terhadap tingkat Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam melihat realitas dari pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat Pengangguran.
2. Bagi akademisi dan peneliti dapat menjadi tambahan referensi mengenai pelaksanaan konsep desentralisasi fiskal dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.